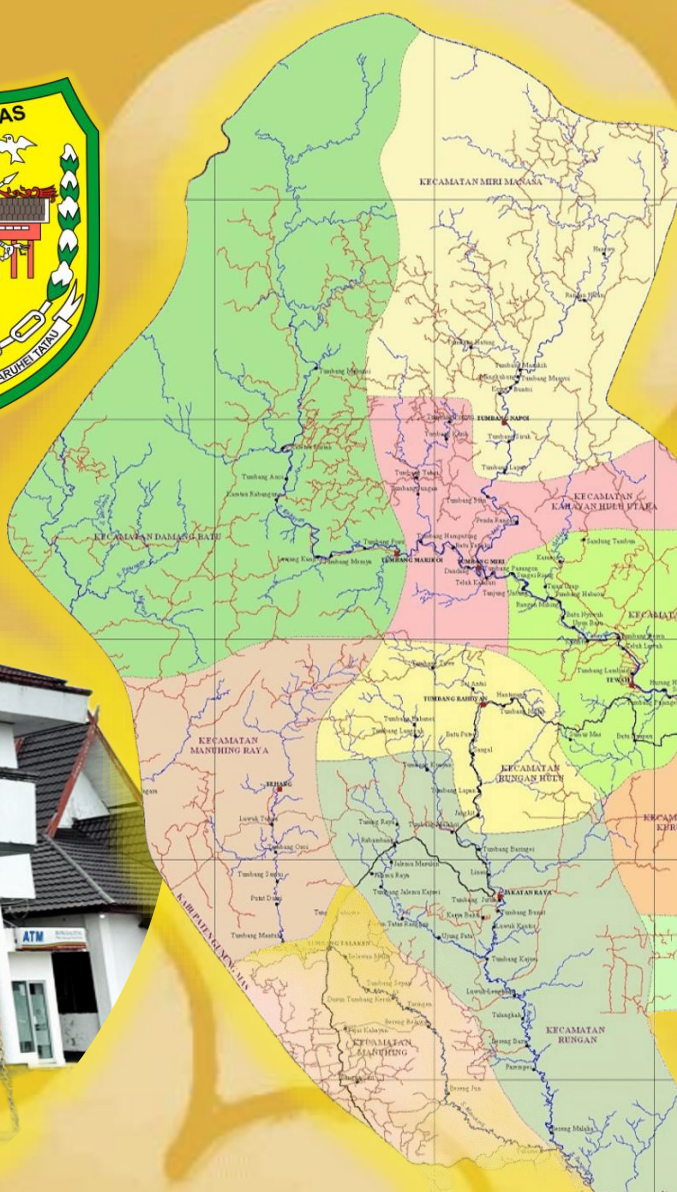




KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan Berkah, Kasih dan Karunia-Nyalah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada Tujuan EKPPD yakni menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Upaya peningkatan Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seluruh hasil Kegiatan baik yang menyangkut Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan APBD di tahun 2024, berikut permasalahan dan solusi terangkum secara singkat dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1), bahwa Kepala

Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika dan Materi Laporan ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini merupakan Progres Report Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah sebagai sarana pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dan telah direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Semoga Laporan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya dengan semangat kebersamaan kita bangun **"Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau"** Kabupaten Gunung Mas ini menjadi Kabupaten yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.

Kuala Kurun, Maret 2025
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	21
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	48
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	
DAERAH	51
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	51
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	56
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	85
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..	118
3.1 Target Kinerja	118
3.2 Realisasi Kinerja	120
3.3 Hambatan / Permasalahan	121
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN	
MINIMAL.....	122
4.1 Urusan Pendidikan.....	122
4.2 Urusan Kesehatan	127
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	133
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	135
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
Masyarakat.....	138
4.6 Urusan Sosial.....	142
BAB V PENUTUP.....	146

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan Berkat, Kasih dan KaruniaNya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada Tujuan EKPPD yakni menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Upaya peningkatan Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seluruh hasil Kegiatan baik yang menyangkut Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan APBD di tahun 2024, berikut permasalahan dan solusi terangkum secara singkat dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1), bahwa Kepala

Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika dan Materi Laporan ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini merupakan Progrees Report Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah sebagai sarana pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dan telah direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Semoga Laporan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya dengan semangat kebersamaan kita bangun **"Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau"** Kabupaten Gunung Mas ini menjadi Kabupaten yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.

Kuala Kurun, Maret 2025
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Gunung Mas menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,90	73.88	0.957
2	Angka Kemiskinan	5,47	5.68	3.839
3	Angka Pengangguran	3,24	3.12	-3.704
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,25	4.48	5.412
5	Pendapatan Per Kapita (Pendekatan dengan Pengeluaran Per Kapita)	60349.2	67075.3	11.145
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,309	0.255	-17.476

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Data Strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Indeks Pembangunan Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Gunung Mas	70,81	71,03	73,01	73,18	73,88

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu mulai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan dan perkembangan nilai yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 3,07% dari semula 70,81 menjadi 73,88. Hal ini berarti menunjukkan bahwa capaian dari sisi Kesehatan, Pendidikan, Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah meningkat.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas terjadi penurunan sebesar 0,21 persen di Tahun 2024 pada angka 5,68 ribu orang dibandingkan dengan Tahun 2023 pada angka 5,47 ribu orang. Angka ini menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan dihitung berdasarkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan.

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Pada Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi -3.704 persen dibandingkan tahun lalu.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan Riil PDRB) adalah proses perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Tetapi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 sebesar 4,48 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 4,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di bidang

ekonomi di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen.

2.1.5. Pendapatan Perkapita (Pendekatan dengan Pengeluaran Perkapita)

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pendapatan per kapita di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,145 yang menandakan bahwa Tingkat pendapatan rata-rata Masyarakat Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio

bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2019 (0,302) sampai dengan tahun 2024 (0,255) mengalami kenaikan. Kenaikan merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemerataan pendapatan.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

II. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Perpustakaan
16. Urusan Kearsipan

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

2. Urusan Parawisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

IV. Urusan Pemerintahan untuk Urusan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pembangunan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja (%)
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 3.389 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 5.474	61,9108513
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 17.487 Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16.970	103,0465527
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 6.767 Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 8.280	81,7270531
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 33	19,0751445

			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 173	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 135 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 134.428	1,0042551
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1 Jumlah RS di kabupaten/kota = 2	50
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 2.353 Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 2.353	100
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 1.799 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 2.246	80,0979519
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2.866 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 2.866	100

1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 10.771 Jumlah balita di kabupaten/kota = 10.794	99,7869187
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 24.869 Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 25.250	98,4910891
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 87.279 Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 87.279	100
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 8.364 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 8.903	93,9458609
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.095 Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	100

			= 1.095	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2.041 Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 2.041	100
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 182 Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 182	100
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.774 Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 1.939	91,490459
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 2.360 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 2.590 standar = 2.474 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 2.505	91,1196911

1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 74,66 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 283,03	26,3788291
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 501,79 luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 2.146	23,3825722
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	53,4801376

		seluruh kabupaten/kota	jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 15.859 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 29.654	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 10.908 Jumlah rumah di Kabupaten A = 29.654	36,784245
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 181 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 181	100
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 256,03 Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 738,992	34,6458419
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan	5,0239234

			dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 21 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 418	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 161 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 161	100
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 45 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 3	1.500
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

			pelayanan = 0	
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 18,2 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 547,4	3,3248082
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 2.358 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 29.654	7,9517097
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 11 Jumlah unit rumah kab/kota = 29.654	0,0370945
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 6 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 6	100
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7	100
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 142.309 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	100

			rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 142.309	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 62.583. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 62.583	100
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 6 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 44	13,63
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 6 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 6	100
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	13,5

1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 424 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 424	100
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 2.214 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 2.214	100
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 16 Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 16	100
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 0 Jumlah tenaga kerja	0

			keseluruhan = 12.327	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 8.619,98 Jumlah tenaga kerja = 12.327	69,9276385
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 18 Jumlah Perusahaan = 27	66,6666667
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan = 5.567 Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 5.758	96,682876
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 31.161.227.252 Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1.375.732.387.178	2,2650646
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 23 Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 23	100

2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 3 Jumlah penduduk perempuan = 41.809	7,1754885
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 52,2 Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 10,27	508,2765336
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 923.656.852 seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 923.656.852	100
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 137.116 Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 127.685	107,3861456
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 923.475.640 Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 923.475.640	100

2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0 Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 44.096 Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 44.096	100
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 2 Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2	100
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		69,33
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 3.577 Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 36.814,45	9,7162935
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	55,2631579

			= 21 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 38	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 87.151 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 90.948	95,8250869
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 29.411 Jumlah anak usia 0-17 tahun = 43.533	67,5602417
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 45.479 Jumlah anak usia 0-18 tahun = 46.068	98,7214552
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 3 Jumlah PD = 9	33,3333333
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 4 Jumlah desa tertinggal (per- awal tahun n)	19,047619

			= 21	
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0 Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 58	0 Ket : Belum ada desa yang memenuhi kriteria desa berkembang ke desa mandiri
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : Angka Kelahiran Total ASFR: Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama	2,34
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 15.440 Jumlah Pasangan Usia Subur = 21.005	73,506308
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 1.022 Jumlah Pasangan Usia Subur = 21.005	4,8655082
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	85,2

2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0 Ket : Belum Pernah Melaksanakan pendataan VC ratio secara menyeluruh dan tidak adanya SDM dibidang Transportasi Darat
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 27 Jumlah PD = 38	71,0526316
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 5 Jumlah Layanan Publik = 19	26,3157895
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 90.239 Jumlah penduduk = 90.239	100
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 12 Jumlah seluruh koperasi aktif	85,7142857

			= 14	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 104 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 3.663	2,8392028
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -1.057.471.269.755 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 4.010.673.960.919	-26,3664232
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 117 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 34.575	0,3383948
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 195 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 34.575	0,5639913
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	8

2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 38 jumlah PD = 38	100
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 38 jumlah PD = 38	100
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 249 Jumlah area penilaian = 312	79,8076923
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 14 Jumlah cagar budaya yang terdata = 37	37,8378378
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	58,177
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan	51,07

			literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$	74,97
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$	33,3
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 1.483,02 Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 1.690	87,7526627
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 19 Jumlah wisatawan tahun n-1 = 34	55,8823529
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 4.741 Jumlah wisatawan tahun n-1 = 25.843	18,3453933
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 15.106 Jumlah kamar yang tersedia = 124.100	12,1724416

3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 146.900.000 Total PDRB Berlaku = 8.620.000.000	1,7041763
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 659.712.713 Total realisasi PAD = 58.706.100.084,9	1,123755
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 1.272,73 luas panen = 474,5	268,2255005
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -17 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 19	-89,4736842
3.d	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		100
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0 Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0 Ket : Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki energi panas bumi yang dapat

			= 0	dimanfaatkan
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 134 Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 1.016	13,1889764
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 95 RDKK = 99	95,959596
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 855 jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1.034	82,688588
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 31 Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 371	8,3557951
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0

3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Informasi industri: 2) Kelengkapan informasi industri:	100
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		100

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 152.713.454.886 Jumlah APBD	30,1794393

			= 506.018.198.308	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 58.706.100.084,94 Jumlah Pendapatan pada APBD = 1.441.535.863.459,9	4,0724689
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	-
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	3
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 266.364.663.053 jumlah belanja APBD = 1.430.983.319.484	18,6140998

4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		100
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0 jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 318.434.627.185,66	0
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 0 Jumlah seluruh pengadaan = 0	0
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 1.080 total belanja operasi dan modal = 2.190	69,69
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-	102,69

			1)= 168.448.619.997,12 Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 164.022.601.025,93	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.288 Jumlah seluruh pegawai = 1.435	89,7560976
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 567 seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.399	40,5289492
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 7 seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 567	1,2345679
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 1.430.983.319.484 Total Belanja APBD = 1.404.290.475.252	1,9008

4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 58.706.100.084,94 Total PAD dalam APBD = 78.221.390.775	24,9488
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		75
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 49.478.072.598,69 total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.250.220.807.539,1	3,9575467
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 103.025.000 Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 107.435.200	95,8950139
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 11 total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	91,6666667

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan pengukuran sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan, yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja.

Berikut disajikan data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 Berdasarkan RPJMD dalam tabel sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.3.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 Berdasarkan RPJMD

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)							
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	TARGET				
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2021	2022	2023	2024	
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional							
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas		Indeks Kualitas Infrastruktur	-	44,82	46,36	47,90	49,44
	Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan	Indeks Konektivitas Wilayah	-	62,50	65,00	67,50	70,00
	Meningkanya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	27,14	27,72	28,30	28,88
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)							
Meningkatkan Daya Saing SDM		IPM	-	71,13	71,42	71,70	71,99
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,25	63,43	63,62	63,80
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,63	77,76	77,89	78,02
	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	89,58	89,90	90,15	90,45
	Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelansi Stunting	%	21,56	18,55	16,01	13,94
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah							
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah		LPE	%	4,27	5,18	6,07	7,00
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,56	5,47	6,38	7,29
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	20,00	25,00	30,00	35,00
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	4,52	4,26	4,00	3,80
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,25	2,12	2,00

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)

PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	TARGET			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	-	0,26	0,26	0,25	0,24
	Pendapatan Perkapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	11056	11238	11421	11603
Misi 4: Mempercepat Reformasi Birokrasi						
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	-	62,00	64,00	66,00	68,00
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	-	B	B	BB	BB
	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)
Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)						
Misi 8: Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI						
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	-	77,00	78,00	79,00	80,00
Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	75,00	70,00	65,00	60,00
Misi 6: Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal						
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	25,00	30,00	35,00	40,00
Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	28,00	37,00	48,00	60,00
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	1,00	1,50	2,00	2,50

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)							
PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	TARGET			
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah		2021	2022	2023	2024
	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	9,00	10,00	11,00	12,00
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)							
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76.90	76,91	76,92	76,93
	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46,69	46,70	46,71	46,72
		Indeks Kualitas Udara	%	89,50	89,60	89,70	89,80
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90,15	90,20	90,25	90,30
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas							

Dalam proses penentuan IKU Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan tahap-tahap untuk penyusunan IKU untuk semua Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Misi, 16 (Enam Belas) Sasaran Strategis, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan tabel data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 Berdasarkan RPJMD di atas, kemudian disusunlah Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.2.
Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2019-2024

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional							
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW	Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat		Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)							
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan keterampilan perempuan dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	Menurunnya Prevelensi Stunting	Melaksanakan aksi konvergensi	Mendukung 8 aksi konvergensi KP2S	Angka Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah							
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah		Peningkatan kemudahan perizinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat	Indeks Gini	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pendapatan Perkapita	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Misi 4 Mempercepat Reformasi Birokrasi							
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintah	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT KABUPATEN
			Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)							
Misi 8 Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI							
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Misi 6 Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal							
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah		Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Misi 7 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)							
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
				Indeks Kualitas Udara			
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan			

Tabel 2.3.3.
Identifikasi Proses Utama (Sasaran) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

NO	PROSES	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Utama
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Utama
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Utama
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Utama
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Utama
6	Menurunnya Prevalensi Stunting	Utama
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Utama
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Utama
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Utama
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Utama
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Utama
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Utama
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Utama
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Utama
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Utama
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Utama

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi Pencapaian Kinerja Program berdasarkan capaian rata-rata atas indikator (*outcome*) menjadi empat kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3.4. Kategori Capaian Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan target yang termuat dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 Berdasarkan RPJMD, maka disusunlah tabel Target dan Realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.3.5.
Target dan Realisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2021-2024

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)												
PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Ket
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah	2021		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional												
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	44,82	46,36	47,90	49,44	46,36	43,37	64,38	65,14		
Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan Komunikasi	Indeks Konektivitas Wilayah	-	62,50	65,00	67,50	70,00	65,00	66,01	78,54	80,12		
Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	27,14	27,72	28,30	28,88	27,72	74,97	91,79	92,04		
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)												
Meningkatkan Daya Saing SDM	IPM	-	71,13	71,42	71,70	71,99	71,03	71,40	73,18	73,88		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,25	63,43	63,62	63,80	63,65	63,40	64,31	Belum	on proses	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,63	77,76	77,89	78,02	77,63	78,03	82,00	83,00		
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	89,58	89,90	90,15	90,45	88,22	89,15	89,29	Belum	on proses	
Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelansi Stunting	%	21,56	18,55	16,01	13,94	17,75	(data EPP)	16,37	10,39	**2024	
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah												
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	LPE	%	4,27	5,18	6,07	7,00	5,09	6,47**	4,25	4,48		
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,56	5,47	6,38	7,29	4,97*	5,21**	7,21	2,18		
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	20,00	25,00	30,00	35,00	10,00	25,00	33,78	5,86		
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,52	4,26	4,00	3,80	5,35	5,64	4,58	5,68		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,25	2,12	2,00	3,11	2,96	3,24	3,12		
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	-	0,26	0,26	0,25	0,24	0,28	0,26	0,31	0,26		
	Pendapatan Perkapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	11056	11238	11421	11603	10809	10990	11462	18854		
Misi 4: Mempercepat Reformasi Birokrasi												
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	-	62,00	64,00	66,00	68,00	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	Belum	Penilaian Akhir November	
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	-	B	B	BB	BB	B	B	B (62,14)	B (61,63)		
	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasa Masyarakat	-	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	84,25 (Baik)	81,06 (Baik)	81,66 (Baik)	83,93 (Sangat Baik)		
Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)												
Misi 8: Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI												
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	-	77,00	78,00	79,00	80,00	71,00	97,00	87,00	72,41		
Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	75,00	70,00	65,00	60,00	91,00	97,00	57,00	174,00		
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas												

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)												
PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Ket
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Misi 6: Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal												
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah			%	25,00	30,00	35,00	40,00	20,00	11,00	11,00	2,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	28,00	37,00	48,00	60,00	28,00	43,00	45,00	229,00	
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)			%	1,00	1,50	2,00	2,50	1,00	1,06	1,75	6,97	
	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	9,00	10,00	11,00	12,00	9,00	3,00	5,00	26,00	
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)												
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			-	76,90	76,91	76,92	76,93	69,80	68,82	70,58	69,33	
	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46,69	46,70	46,71	46,72	50,00	46,67	50,00	42,86	
		Indeks Kualitas Udara	%	89,50	89,60	89,70	89,80	87,65	87,85	89,64	92,82	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90,15	90,20	90,25	90,30	71,25	71,25	70,66	71,31	
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas												

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS AKSESIBILITAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi diukur melalui indikator Indeks Konektivitas Wilayah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Indeks Konektivitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu: (1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan (2) Program Penyelenggaraan Jalan.

Tabel 1.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Indeks Konektivitas Wilayah	-	62,50	65,00	67,50	70,00	65,00	66,01	78,54	80,12	114,46

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS AKSESIBILITAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI** yang diukur dengan Indikator Indeks Konektivitas Wilayah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 114,46%.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN MASYARAKAT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat diukur melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 2 ini, yaitu: (1) Program Pengembangan Perumahan; dan (2) Program Kawasan Permukiman.

Tabel 2.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	27,14	27,72	28,30	28,88	27,72	74,97	91,79	92,04	318,70

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN MASYARAKAT** yang diukur dengan Indikator Rasio Rumah Layak Huni, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 318,70%.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan diukur melalui indikator Indeks Pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 3 ini, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Tabel 3.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,25	63,43	63,62	63,80	63,65	63,40	64,31	Belum	N/A

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN** yang diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan, persentase capaian belum dapat dinilai karena sampai laporan ini dibuat, data masih belum tersedia.

SASARAN STRATEGIS 4**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.**Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 4 ini, yaitu: (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Tabel 4.2.**Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,63	77,76	77,89	78,02	77,63	78,03	82,00	83,00	106,38

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 106,38%.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 5 ini, yaitu: Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 5.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	89,58	89,90	90,15	90,45	88,22	89,15	89,29	Belum	N/A

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 5: MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN** yang diukur dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, persentase capaian belum dapat dinilai karena sampai laporan ini dibuat, data masih belum tersedia.

SASARAN STRATEGIS 6

MENURUNNYA PREVELENSI STUNTING

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 6: Menurunnya Prevelensi Stunting diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1.
Sasaran Strategis 6: Menurunnya Prevelensi Stunting

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
6	Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 6 ini, yaitu: Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Tabel 6.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6: Menurunnya Prevelensi Stunting

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
6	Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelensi Stunting	%	21,56	18,55	16,01	13,94	17,75	18,34	16,37	10,39	134,17

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 6: MENURUNNYA PREVELENSI STUNTING** yang diukur dengan Indikator Angka Prevelensi Stunting, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 134,17%.

SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dalam sasaran strategis 7 ini, yaitu: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Tabel 7.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,56	5,47	6,38	7,29	4,97*	5,21**	7,21	2,18	29,90

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 7: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAERAH** diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, persentase capaian masuk dalam Sangat Rendah dengan capaian 29,90%.

SASARAN STRATEGIS 8

MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.1.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 8 ini, yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tabel 8.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	20,00	25,00	30,00	35,00	10,00	25,00	33,78	5,86	16,74

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 8: MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH** diukur melalui indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Rendah dengan capaian 16,74.

SASARAN STRATEGIS 9**MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.1.
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 9 ini, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Tabel 9.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,25	2,12	2,00	3,11	2,96	3,24	3,12	64,10

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 9: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA** yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Rendah dengan capaian 64,10%.

SASARAN STRATEGIS 10**MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Indeks Gini dan Pendapatan Perkapita sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10.1.
Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
		Pendapatan Perkapita	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu: (1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (2) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Tabel 10.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	-	0,26	0,26	0,25	0,24	0,28	0,26	0,31	0,26	94,12
		Pendapatan Perkapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	11056	11238	11421	11603	10809	10990	11462	18854	162

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 10: MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT** yang diukur dengan indikator Indek Gini dan dan Pendapatan Perkapita termasuk dalam: (1) Indek Gini persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 94,12%; dan (2) Pendapatan Perkapita persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 162%.

SASARAN STRATEGIS 11
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11.1.
Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) program dalam sasaran strategis 11 ini, yaitu: (1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (3) Program Kepegawaian Daerah; (4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; (5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan (6) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 11.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	B	B	B (62,14)	B (61,63)	88,03
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum	N/A

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 11: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH** yang diukur dengan Indikator Nilai SAKIP, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 88,03%, dan Untuk Indikator Opini BPK belum dapat dihitung persentase capaiannya dikarenakan data belum dipublish oleh BPK.

SASARAN STRATEGIS 12

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12.1.

Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 12 ini, yaitu: (1) Program Pendaftaran Penduduk; dan (2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Tabel 12.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	84,25 (Baik)	81,06 (Baik)	81,66 (Baik)	83,93 (Sangat Baik)	98,29

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 12: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 98,29%.

SASARAN STRATEGIS 13

MENINGKATNYA RASA AMAN DI KALANGAN MASYARAKAT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat diukur melalui indikator Penurunan Jumlah Tindak Pidana sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.1.

Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 13 ini, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 13.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	75,00	70,00	65,00	60,00	91,00	97,00	57,00	174,00	34,48

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 13: MENINGKATNYA RASA AMAN DI KALANGAN MASYARAKAT** diukur melalui indikator Penurunan Jumlah Tindak Pidana, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Rendah dengan capaian 34,48%.

SASARAN STRATEGIS 14**MENINGKATNYA PENGELOLAAN BUDAYA DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah diukur melalui indikator Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14.1.**Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Tabel 14.2.**Target dan Realisasi Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat**

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	28,00	37,00	48,00	60,00	28,00	43,00	45,00	229,00	381,67

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 14: MENINGKATNYA PENGELOLAAN BUDAYA DAERAH** yang diukur dengan Indikator Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian **381,67%**.

SASARAN STRATEGIS 15
MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 15: Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah diukur melalui indikator Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15.1.

Sasaran Strategis 15: Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 15 ini, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Tabel 15.2.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	9,00	10,00	11,00	12,00	9,00	3,00	5,00	26,00	216,67

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 15: MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI DAERAH** yang diukur dengan Indikator Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 216,67%.

SASARAN STRATEGIS 16**MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 16: Menurunnya Pencemaran Lingkungan diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16.1.
Sasaran Strategis 16: Menurunnya Pencemaran Lingkungan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		Indeks Kualitas Udara			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan			

Berdasarkan Tabel 16.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 16 ini, yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Tabel 16.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	SATUAN	TARGET				CAPAIAN				Persentase Capaian 2024
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46,69	46,70	46,71	46,72	50,00	46,67	50,00	42,86	109,01
		Indeks Kualitas Udara	%	89,50	89,60	89,70	89,80	87,65	87,85	89,64	92,82	96,75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90,15	90,20	90,25	90,30	71,25	71,25	70,66	71,31	126,63

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 16: MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN** yang diukur melalui indikator (1) Indeks Kualitas Air, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 109,01%; (2) Indeks Kualitas Udara, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 96,75%; dan (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 126,63%.

**REALISASI CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024 SESUAI DENGAN DOKUMEN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 - 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI					PERNGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	44,82	46,36	42	46,36	43,37	64,38	65,14	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Indeks Konektivitas Wilayah	-	62,5	65	60	65,00	66,01	78,54	80,12	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Rasio Rumah Layak Huni	%	27,14	27,72	25,56	27,72	74,97	91,79	92,04	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	IPM	-	71,13 2	71,41 8	70,81	71,03	71,40	73,18	73,88	BPS KAB. GUNUNG MAS
5	Indeks Pendidikan	-	63,25	63,43	63,19	63,65	63,40	64,31		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	Indeks Kesehatan	-	77,63	77,76	77,54	77,63	78,03	82	83	DINAS KESEHATAN
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	89,58	18,55	88,2	88,22	89,15	89,29		DINAS P2KBP3A
8	Angka Pravalensi Stunting	%	21,56	18,55	22,87	17,75	18,34 (data EPPGB M)	16,37	10,39	DINAS KESEHATAN

9	LPE	%	4,27	5,18	3,36	5,09	6,47	4,25	4,48	BPS KAB. GUNUNG MAS
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,56	5,47	3,65	4,97*	5,21	7,21	2,18	BPS KAB. GUNUNG MAS
11	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	20	25	10	10%	25	33,78	5,86	DINAS PMPTSP
12	Tingkat Kemiskinan	%	4,52	4,26	4,75	5,35	5,64	4,58	5,68	BPS KAB. GUNUNG MAS
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,25	2,49	3,11	2,96	3,24	3,12	BPS KAB. GUNUNG MAS
14	Indek Gini	-	0,263	0,257	0,279	0,278	0,262	0,309	0,255	BPS KAB. GUNUNG MAS
15	Pendapatan Per Kapita	Ribu/Kapita/Tahun	12.919	13.492	11.238	10.809	10.990	11.462	18.854	BPS KAB. GUNUNG MAS
16	Indeks Reformasi Birokrasi	-	62	64	60	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)		SETDA / BAGIAN ORGANISASI
17	Nilai SAKIP	-	B	B	B	B	B	B (62,14)	B (61,63)	SETDA / BAGIAN ORGANISASI
18	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		BADAN KEUANGAN DAERAH

19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	77,53	84,25 (baik)	81,06 (Baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)	SETDA / BAGIAN ORGANISASI
20	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	77	78	76,54	71	107,89	84,76	72,41	BADAN KESBANGPOL
21	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	75	70	81	91	114	151	174	BADAN KESBANGPOL
22	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	25	30	20	20	11	11	2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
23	Jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	28	37	NA	28	43	45	229	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	1	1,5	0,5	1	1,06	1,75	6,97	BPS/ DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
25	Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah	-	9	10	8	9	3	5	26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	score	76.90	76,91	76	69,8	68,82	70,58	69.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN

										KEHUTANAN
27	Indeks Kualitas Air	score	46,69	46,7	46	50,00	46,67	50	42.86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN
28	Indeks Kualitas Udara	score	89,5	89,6	89	87,65	87,85	89,64	92.82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN
29	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	score	90,15	90,2	90	71,25	71,25	70,66	71.31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PBN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2022;

10. Surat Pengesahan DIPA DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 018.08.4.149120/2024 Tanggal 17 April 2024 (Revisi - 7);
11. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/SATKER-08/TP/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024 tentang struktur organisasi, uraian tugas, pembagian tugas, honorarium, pejabat pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 08 Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS BANTUAN

1. Kementerian Pertanian;
2. Ditjen PSP.

4.1. TARGET KINERJA

4.1.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA

1. Perlindungan dan Penyediaan Lahan Optimasi Lahan Rawa
2. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Anggaran

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
Perlindungan dan Penyediaan Lahan Optimasi Lahan Rawa	563.200.000
Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian	16.600.000

Tabel 3.1
Realisasi Tugas Pembantuan

Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Tengah Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Gunung Mas											
NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN	KAB/KOTA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pertanian	Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01/SATKER08/TP/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang struktur organisasi, uraian tugas, pembagian tugas, honorarium, pejabat pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 08	1. Perlindungan dan penyediaan lahan optimasi lahan rawa 2. Pengelolaan System penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian	Kabupaten Gunung Mas	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas (Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas)	10.000.000 41.200.000	10.000.000 41.200.000	100% 100%			

3.3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi adalah dalam upaya peningkatan indeks pertanaman dilakukan upaya perbaikan tata kelola air pada lokasi lahan rawa yang dipergunakan untuk lahan persawahan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya petani dan tidak adanya regenerasi petani tua ke petani muda serta penggunaan alat dan mesin pertanian yang dilakukan oleh petani tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terdapat banyak alat dan mesin pertanian yang hilang dan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			%	Tahun	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4.654	2024	9,146,724,421,-
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	31.502	2024	53,587,873,377,-
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	140	2024	693,315,450,-

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian
			Orang	Orang	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4.654	4.654	100
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	31.502	31.502	100
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	140	140	100

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas adalah, sebagai berikut:

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	64,427,913,248,-
	JUMLAH	64,427,913,248,-

E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon, sebagai berikut:

- Eselon II.b	=	1 orang
- Eselon III.a	=	1 orang
- Eselon III.b	=	4 orang
- Eselon IV.a	=	15 orang
Total	=	21 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah, sebagai berikut:

- Pasca Sarjana	=	8 orang
- Sarjana (SI)	=	27 orang
- D3	=	2 orang
- SLTA	=	12 orang
Total	=	49 orang

Jumlah Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut:

- Guru PAUD/TK (PNS dan Honor)	=	640 orang
- Jumlah Guru SD/MI (PNS dan Honor)	=	1697 orang
- Jumlah Guru SMP/MTs (PNS dan Honor)	=	652 orang
Total	=	2989 orang

F. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum tercapainya target APK dan APM Jenjang PAUD dan Dikdas;
- 2) Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi);
- 3) Distribusi Pendidik yang belum merata;
- 4) Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- 5) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

b. Solusi

- 1) Optimalisasi Pemanfaatan Pendanaan Pendidikan;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
- 3) Penguatan Lembaga (Satuan Pendidikan) PAUD;
- 4) Mendorong pemerintah desa/kelurahan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas PAUD;
- 5) Meningkatkan aksesibilitas penduduk mendapatkan pelayanan Pendidikan (sekolah), jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- 6) Pengembangan profesionalisme guru dengan lebih aktif mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);
- 7) Mengikutsertakan dalam pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran;
- 8) Melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- 9) Asistensi guru yang telah bersertikat pendidik terhadap guru yang belum bersertifikat pendidik;
- 10) Update data Pendidik disetiap Satuan Pendidikan;

- 11) Pendistribusikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
- 12) Pengangkatan tenaga Pendidik melalui PPPK untuk mengisi kekurangan guru;
- 13) Diterbitkannya regulasi (Peraturan Bupati) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- 14) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang sudah ada di setiap Satuan Pendidikan;
- 15) Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah);
- 16) Memperkuat manajemen sekolah yakni Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan (sekolah);
- 17) Pembebasan Biaya Sekolah;
- 18) Bantuan perlengkapan siswa;
- 19) Edukasi orang tua/wali siswa, tentang pentingnya Pendidikan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human Immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			%	Tahun	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2.353	2024	341,558,200,-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.246	2024	964,642,000,-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2.139	2024	158,598,200,-

4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.794	2024	310,849,990,-
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19.283	2024	885,724,800,-
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	22.097	2024	249,300,600,-
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.846	2024	132,952,410,-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.095	2024	188,194,300,-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	2.041	2024	334,775,400,-
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	182	2024	181,669,100,-
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan	1.939	2024	246,036,910
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.	2.590	2024	214,403,600

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2024
			orang	orang	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2.353	2.353	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.246	1.799	80,10
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2.139	2.139	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.794	10.771	99,79
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19.283	18.991	98,49
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	22.097	22.097	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.846	12.068	93,94
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.095	1.095	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	2.041	2.041	100

10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	182	182	100
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.939	1.774	91,49
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.	2.590	2.360	91,12

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	4,208,705,510,00
	JUMLAH	4,208,705,510,00

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah:

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon, sebagai berikut :

- Eselon II.b = 1 orang
- Eselon III.a = 1 orang
- Eselon III.b = 3 orang
- Eselon IV.a = 12 orang
- Eselon IV.b = 0 orang

Jumlah = 17 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah, sebagai berikut:

➤ Dokter	= 35 orang
➤ Dokter Spesialis	= 11 orang
➤ Dokter Gigi	= 1 orang
➤ Apoteker	= 11 orang
➤ Perawat	= 455 orang
➤ Bidan	= 259 orang
➤ Perawat Gigi	= 9 orang
➤ Kesmas	= 13 orang
➤ Kesling	= 9 orang
➤ Pranata Labkes	= 25 orang
➤ Nustrisionis	= 19 orang
➤ Ass. Apoteker	= 30 orang
➤ Non Kes	= 169 orang
Jumlah	= 1.1011 orang

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Keterbatasan anggaran APBD terutama bersumber DAU mengakibatkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan sebagian besar didanai dari Dana DAK yang penggunaannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Juknis serta hanya pada Tingkat Puskesmas (tidak pada Level Desa/Pustu/Poskesdes) sehingga penerapan SPM di ujung tombak pelayanan kurang optimal;
- 2) Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas belum merata untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik ke masyarakat

sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan masih belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh nasional;

- 3) Penetapan target, sistem pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan serta Koordinasi baik itu pada level petugas kesehatan di lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng bahkan pada level Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan RI yang belum terpadu dan konsisten;
- 4) Pemahaman Petugas Kesehatan Definisi Operasional dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang belum sempurna saat melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Perilaku hidup masyarakat, budaya serta yang ada seringkali menjadi kendala petugas kesehatan di lapangan sehingga pencapaian target suatu kegiatan menjadi kurang maksimal. Misalnya : pada pelayanan kesehatan usia produktif atau hipertensi banyak masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatan (upaya promotif) saat sehat tetapi akan berkunjung saat sakit;
- 6) Masih adanya Pandemi Covid-19 sehingga menghambat terlaksananya kegiatan-kegiatan, Misalnya anak-anak sekolah yang belajar dengan sistem jarak jauh (daring).

b. Solusi

- 1) Melakukan efektifitas anggaran serta berorientasi pada pencapaian SPM dengan melakukan Perencanaan yang tepat, sesuai kebutuhan dan terarah;
- 2) Penambahan Tenaga Kesehatan di daerah melalui program nusantara sehat, pengangkatan tenaga kontrak daerah serta menggiatkan kegiatan luar gedung yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian SPM;

- 3) Penetapan Target sasaran serta petunjuk pelaksanaan SPM di bidang kesehatan dibuat pada awal tahun serta dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPM di Puskesmas;
- 4) Sosialisasi tentang Definisi Operasional SPM pada Pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;
- 5) Koordinasi dengan Lintas Sektor, pihak pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dasar terutama yang berkaitan dengan SPM serta memodifikasi pelayanan sesuai dengan kearifan local daerah.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	976	2024	8,016,600,062,00

2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	828	2024	2,559,592,600,00
----	---	--	-----	------	------------------

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2024
			Orang	Orang	%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	976	976	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	828	720	86,96

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	10,576,192,662,00
	JUMLAH	10,576,192,662,00

E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 62 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Terbatas;
- 2) Kapasitas pengolahan air (IPA) yang masih kecil kapasitasnya;
- 3) Kurangnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penunjang air bersih yang telah dibangun.

b. Solusi

- 1) Pembangunan (IPA) baru untuk perluasan pelayanan kebutuhan air bersih;
- 2) Peningkatan kapasitas instalasi pipa yang terbangun untuk pengembangan dan perluasan spam di kecamatan;
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penunjang air bersih yang telah dibangun sebagai melayani kebutuhan air bersih.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten;
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Untuk Tahun 2024 tidak terjadi bencana dan tidak ada program relokasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			%	Tahun	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2024	47,016,456,00
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2024	100.000.000,-

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No		Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2024
				orang	Orang	%
1.		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-
2.		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	147,016,456,00
	JUMLAH	147,016,456,00

E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 62 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Jenis Pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten di tahun 2022 pembiayaan hanya untuk belanja penunjang;
- 2) Hingga saat ini di Kabupaten Gunung Mas tidak terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

b. Solusi

- 1) Untuk pembiayaan jenis pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten untuk capaian SPM rumah yang layak huni di anggarkan di tahun 2022;
- 2) Bila terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten akan segera dianggarkan.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	2024	611,964,065,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	142.309	2024	1,288,383,087,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	142.309	2024	457,602,750,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13607	2024	475,664,822,00
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	11	2024	1,266,446,037,00

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2024
			Orang	Orang	%
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	51	100
2.	Pelayanan informasi rawan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi	142.309	142.309	100

	bencana	rawan bencana			
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	142.309	142.309	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13607	13607	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	11	11	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Satpol PP	1.877.410.102,00
2	BPBD	2,221,650,659,00

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebanyak 35 personil, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 16 personil. Personil tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah dilatih sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

6. Permasalahan dan Solusi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas;
- 2) Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban dan Pemadam Kebakaran belum memadai.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti pendidikan/pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Untuk sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diusulkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas

a. Permasalahan

- 1) Belum tersedianya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Kurangnya koordinasi yang humanis dan sinergi pada saat perencanaan kegiatan;
- 4) Belum pernah dilaksanakan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

b. Solusi

- 1) Agar di tahun mendatang dalam menyusun dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);
- 2) Agar mengusulkan sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Diharapkan agar dilaksanakan rapat koordinasi Pra penyusunan program sebelum pelaksanaan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4) Perlu diusulkan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

4.6. URUSAN SOSIAL

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	80	2024	472,279,086,00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80	2024	119,460,000,00

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2024
			orang	orang	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	80	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	80	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	80	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang	0	0	-

	tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	600	200	100

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD LAINNYA	483.819.964,00 -
	JUMLAH	483.819.964,00

E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 23 orang
- b. Non-PNS = 22 orang

Selain pegawai yang pendukung administrasi, dalam pogram kegiatan dibantu oleh petugas lapangan sebagai pendamping program, baik itu program kabupaten maupun program nasional, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan (TSKS)	12 orang	Bertugas di wilayah Kecamatan
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	145 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
3.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	10 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	10 orang	Bertugas Di Wilayah Kacamatan

F. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum Tuntasnya penanganan Penyandang Disabilitas Mental;
- 2) Belum adanya SDM Pekerja Sosial dalam penanganan penerapan SPM;
- 3) Kurangnya Alokasi Anggaran untuk menerapkan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 59 Tahun 2021.

b. Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten masalah penanganan Penyandang Disabilitas Mental pasca rujukan;
- 2) Mengusulkan penerimaan CPNS/P3K untuk formasi pekerja sosial.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menggambarkan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024, dimana setiap organisasi pemerintah menyampaikan hasil penyelenggaraannya dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dituangkan melalui indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Didalam Laporan ini disampaikan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didalamnya terdapat Visi Misi Kepala Daerah, Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan. Untuk Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 tidak ada, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2024 ini. Sekiranya masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini, maka kami sangat mengharapkan masukan baik dari masyarakat dalam hal untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Sekian dan terima kasih.